

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DARTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6.1 Tipe Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II. Ratio Legis Pengaturan Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus	16
2.1 Ratio Legis Pengaturan Eksistensi Partai Politik Lokal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus	33
2.1.1. Sektarianisme dan Separatisme di Aceh	38
2.1.2. Sektarianisme dan Separatisme di Papua	42
2.1.3. Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Negara Dalam Meminimalisir dan Meredam Gejolah Sektarianisme dan Separatisme	47
2.2. Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Sistem Ketatanegaraan I ndonesia.....	50

2.3. Eksistensi Partai Politik Lokal di Berbagai Negara.....	51
2.3.1. Partai Politik Lokal di Inggris	52
2.3.2. Partai Politik Lokal di India.....	55
2.3.3. Partai Politik Lokal di Finlandia	57
2.3.4. Partai Politik Lokal di Spanyol	58
BAB III. Konsekuensi Yuridis Pengaturan Eksistensi Partai Politik Lokal Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemilu	60
3.1. Konsekuensi Yuridis Eksistensi Partai Politik Lokal Terhadap Pemberlakuan <i>Parliamentary Threshold</i> dan <i>Electoral Threshold</i>	68
3.2. Konsekuensi Yuridis Eksistensi Partai Politik Lokal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah	75
3.3. Konsekuensi Yuridis Eksistensi Partai Politik Lokal Terhadap Institusi Penyelenggara Pemilu.....	80
3.4. Konsekuensi Yuridis Eksistensi Partai Politik Lokal Terhadap Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi	86
3.5. Masa Depan Pengaturan Eksistensi Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus Papua	91
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Kesimpulan	94
4.1. Kesimpulan	95
DAFTAR BACAAN	95

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Sebagai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72-73/PUU-II/2004 Tentang Independensi Dan Tanggungjawab KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 Tentang tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;